

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Delly Maulana dan dkk. *Disrupsi Keilmuan Sosial Era Digital Perspektif Administrasi Negara, Komunikasi, dan Hukum*. Diedit oleh Indi Vidyafi. Ke-1. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023.
- Eka NAM Sihombing. *Hukum Pemerintahan Desa*. Diedit oleh Erwin Asmadi. *Enam Media*. Medan: Enam Media, 2021. <https://publication.umsu.ac.id/index.php/bk/article/view/1313>.
- HAW. Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Diedit oleh Rahmatika. Edisi 1, C. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Diedit oleh Ahsan Yunus. EDISI REVI. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Diedit oleh Fatia Hijriyanti. Pertama. Mataram Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020. <https://eprints.unram.ac.id/20305/>.
- Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Desa*. Jakarta Timur: Setara Press, 2015.
- Oksidelfa Yanto. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Diedit oleh Amin Budiman. Pertama. Bandung Jawa Barat: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2018.
- Siti Hajar. *Pemerintahan Desa dan Kualitas Pelayanan Publik*. Diedit oleh Dadang Hartanto. Cetakan Pe. Medan: Umsu Press, 2021.
- Syahrul Mustofa. *Hukum Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia*. Diedit oleh Guepedia. 1 ed. Guepedia, 2020.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Diedit oleh Wulandari Leny. Kesebelas. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Jurnal

- Aang Kusnendar. "Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 2018. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v5i3.1659>.
- Agtha Jumiaty dan Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi. "Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 6 (2022).

<https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.3935>.

Chintya Devi. “Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum.” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11204>.

Debora Agatha Panjaitan dkk. “Tinjauan Yuridis Pengawasan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No . 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Kepala Desa.” *Journal Of Social Science Research* 4 (2024). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7204/7149>.

Deden Haria Garmana dkk. “Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Sumedang.” *JRPA - Journal of Regional Public Administration* 7 (2022). <https://ejournal.lppmunsap.org/index.php/jrpa/article/view/579>.

Edwin Nurdiansyah. “Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat.” *Jurnal Bhineka Tunggal Ika* 3, no. 3 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.36706/jbti.v3i2.4593>.

Eko Nuriyatman dkk. “Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM) Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM).” *Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM)* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.52060/jppm.v5i2.2368>.

Elviandri dan Indra Perdana. “Pembentukan Peraturan Desa (PERDES): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).” *Journal Equitable*, 2015. <https://doi.org/https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2679>.

Endang Retnowati. “Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen).” *Perspektif* 17, no. 1 (2012). <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>.

Fara Merian Sari dkk. “Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau.” *JOELS: Journal of Election and Leadership* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.31849/joels.v3i2.10249>.

Hanina Nafisa Azka dan Fatma Ulfatun Najicha. “Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022). <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2575>.

Jhony K. Yoppy dkk. “Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penggunaan Dana Desa Sebagai Upaya Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2021.

<https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.3341>.

Lely Indah Mindarti dkk. “Penerapan Inovasi Sistem Informasi Manajemen Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 6, no. 1 (2022): 258. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6336>.

Lusya Fista dan Parjiyana. “Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.” *Journal of Public Administration Review* 1, no. 1 (2024). <https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar/article/view/16339>.

Muchsinin. “Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Era Digital Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang).” *Jurnal Governansi* 8, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jgs.v8i2.4732>.

Novi Susanti dan Sukamto Satoto. “Fungsi Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pembangunan.” *MENDAPO Journal of Administration Law* 1 (2020). <https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/10987>.

Riska Chyntia Dewi dan Suparno. “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.” *Jurnal Media Administrasi* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>.

Rusmida Rahmi dan Heni Suparti. “Penerapan Standar Pelayanan Minimal Desa Di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.” *Http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB*, 2023. <https://www.jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/930>.

Skripsi

Resta Dewi Nahawati. “Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung) [Skripsi].” Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022. <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/31369>.

Tiva Chairun Nisa. “Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam [Skripsi].” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019. <https://repository.uin-suska.ac.id/22465/2>.

Website

Pemerintah Desa Mekar Sari. “Website Resmi Desa Mekar Sari.” mekarsari-kumpeh.desa.id, n.d. <https://mekarsari-kumpeh.desa.id/>.

Pemerintah Desa Sungai Aur. “Sistem Informasi Desa Sungai Aur.” sungaiaur-

kumpeh.desa.id, n.d. <https://sungaiaur-kumpeh.desa.id/>.

Smart City Muaro Jambi. “Smart Idea Kabupaten Muaro Jambi,” 2024. <https://muarojambikab.go.id/>.

Sugiman. “Pemerintahan Desa.” *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018). <https://www.neliti.com/publications/275406/pemerintahan-desas>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara. 2008/Nomor. 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4846, Lembar-Lembar Sekretaris Negara: 35 Halaman.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara. 2014/Nomor. 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5495, Lembar Lembar Sekretaris Negara: 65 Halaman.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara . 2009/Nomor. 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5038, Lembar Lembar Sekretaris Negara : 45 Halaman.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara. 2014 Nomor. 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5539, Lembar Lembar Sekretaris Negara : 71 Halaman.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara. 2010 Nomor. 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5149, Lembar Lembar Sekretaris Negara : 12 Halaman.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, Berita Negara 2018 (443) : 9 Halaman.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Berita Negara. 2017/Nomor. 156, kemendagri.go.id : 14 Halaman.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita Negara. 2015/Nomor. 158,

jdih.kemendes.go.id : 9 Halaman.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.